

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS
TANAH DALAM PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM**

Febiola Siburian

213309010347

ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum merupakan kebijakan negara yang strategis, namun kerap menimbulkan konflik kepentingan antara negara dan pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah dalam pelaksanaan ganti kerugian, dengan studi kasus Putusan Nomor: 95/Pdt.G/2021/PN.Kis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, serta data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan ganti rugi dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam hal penilaian besaran ganti rugi dan proses musyawarah. Putusan pengadilan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak pemegang tanah dan menekankan pentingnya perlindungan hukum secara adil dan proporsional. Penelitian ini merekomendasikan adanya perbaikan sistem penilaian ganti kerugian serta penguatan peran lembaga peradilan dalam mengawasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kata Kunci: **Perlindungan hukum, pengadaan tanah, ganti kerugian, kepentingan umum, putusan pengadilan.**

ABSTRACT

Land acquisition for development in the public interest is a strategic state policy, but it often causes conflicts of interest between the state and land rights holders. This study aims to examine the legal protection provided to land rights holders in the implementation of compensation, with a case study of Decision Number: 95/Pdt.G/2021/PN.Kis. The research methods used are normative juridical and empirical juridical, with a qualitative approach to laws and regulations, court decision documents, and field data. The results of the study indicate that in the decision there is a discrepancy between the implementation of compensation and the applicable provisions, especially in terms of assessing the amount of compensation and the deliberation process. The court decision shows a violation of the rights of landholders and emphasizes the importance of fair and proportional legal protection. This study recommends improving the compensation assessment system and strengthening the role of the judiciary in supervising the implementation of land acquisition for the public interest.

Keywords: *Legal protection, land acquisition, compensation, public interest, court decision*